

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pengungsi saat ini menjadi isu yang populer dan hangat diperbincangkan dalam dunia global. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian yang serius dari dunia internasional karena jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Terutama sejak semakin banyaknya konflik internal maupun eksternal yang terjadi di beberapa negara yang mengakibatkan arus pengungsi mengalir deras ke negara-negara lain di sekitar atau bahkan jauh dari negara yang sedang berkonflik tersebut. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan sosial, politik maupun keamanan yang memburuk di negara yang bersangkutan, yang menimbulkan konflik baik antar kelompok, etnis, atau dari negara kepada warga negara sendiri atau antar negara yang berkonflik, sehingga mengakibatkan warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka.

Perang dunia ke 1 dan perang dua ke II merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban manusia, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat

manusia¹ Permasalahan ini menimbulkan problematika, salah satunya nasib orang-orang tersebut. Bagaimanakah mereka mampu bertahan dalam kondisi yang sulit, bagaimana mereka mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keturunannya, sebab pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya maka dari itu mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Setelah adanya perang dunia ke I dan perang dunia ke II konflik yang terjadi di tiap-tiap negara terus berkembang, sehingga menyebabkan krisis ekonomi, pangan, minimnya perawatan kesehatan dan tidak adanya rasa aman terhadap diri yang bersumber dari negara mereka sendiri menyebabkan penduduk dari negara yang berkonflik tersebut berupaya keluar dari negara tersebut untuk mencari perlindungan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Penduduk yang keluar dari wilayah negara mereka dengan alasan mencari perlindungan dari negara lain karena didasari rasa tidak nyaman akan keberadaan mereka di negara sendiri dapat dikategorikan sebagai Pengungsi apabila status mereka telah diakui oleh instrument internasional atau regional yang berkaitan dengan persoalan pengungsi.

Negara Republik Indonesia yang secara geografis terletak pada posisi yang strategis dalam peta dunia telah menjadi tempat transit bagi para pengungsi atau pencari suaka dapat masuk dengan berbagai macam cara. Berdasarkan *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees* atau yang sering disebut juga dengan

¹Achmad Romsan dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm.3.

Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi atau pencari suaka merupakan orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya rasa takut dan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka.² Namun dalam *The 1967 Protocol Relating to The Status Of Refugees* pengertian pengungsi sudah diperluas dengan adanya perluasan dari definisi yang dimuat dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi yaitu tanpa adanya batasan waktu dan berlaku secara universal.³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 70 juta orang menjadi pengungsi sepanjang 2018 yang tersebar secara global. Melalui laporan tahunannya, Badan Pengungsi PBB atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menggambarkan data 70,8 juta pengungsi sampai akhir 2018 layaknya sebuah tradisi.⁴ Hal tersebut akan terus bertambah mengingat konflik yang terjadi di berbagai negara yang tidak kunjung usai.

Lembaga yang diberikan mandat untuk menangani pengungsi adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pengungsi di seluruh belahan dunia, tugas dari UNHCR adalah

²Lihat ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

³Achmad Romsan, Op.Cit., hlm. 89.

⁴2018, Jumlah Pengungsi Global Capai 70,8 Juta Orang

<https://mediaindonesia.com/read/detail/242097-2018-jumlah-pengungsi-global-capai-708-juta-orang>

melindungi, membantu pengungsi dalam mencari solusi atas keadaan mereka, membantu pengungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga pada pemempatan pengungsi tersebut ke negara tujuan. Saat ini banyak terdapat negara-negara yang terikat dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 melalui proses ratifikasi maupun akses yang mempermudah UNHCR dalam penempatan pengungsi ke negara tujuan.

Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah yang dilalui oleh para pengungsi baik melalui jalur pelayaran internasional maka Indonesia tidak menghindarkan diri dari pengungsi. Berdasarkan data dari UNHCR, bahwa kasus arus pengungsi yang masuk ke Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun baik pengungsi yang masuk dengan tujuan mencari suaka maupun tujuan transit. Hal ini secara tidak langsung menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Berikut ini jumlah pencari suaka yang masuk ke Indonesia dan mendaftar ke UNHCR Indonesia: tahun 2008: 385 orang, tahun 2009: 3.230 orang, tahun 2010: 3.905 orang, tahun 2011: 4.052 orang, tahun 2012: 7.223 orang, tahun 2013: 8.332 orang, tahun 2014: 5.659 orang, tahun 2015: 4.426 orang, tahun 2016: 3.112 orang, tahun 2017: 13.840 orang⁵. Data pengungsi yang telah ditangani UNHCR Indonesia selama 2018: 2.945 orang, yang terdiri dari⁶; Afganistan: 1.635 orang, Somalia: 338

⁵Data UNHCR, Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk ke Indonesia
<https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019

⁶*Ibid*

orang, Iran: 251 orang, Eritrea: 186 orang, Myanmar: 114 orang. Data pencari suaka di penampungan Kalideres, Jakarta Barat⁷: 1.266 orang ; Afganistan: 971 orang, Somalia 130 orang, Sudan 70 orang, Cina 1 orang, Palestina 2 orang, Irak 9 orang, Pakistan 45 orang, Iran 7 orang, Etiopia 30 orang, Italia 1 orang

Berdasarkan data di atas jumlah pengungsi di Indonesia dapat diketahui bahwa Afganistan memiliki jumlah pengungsi yang sangat banyak menempati Indonesia khususnya di Ibukota Jakarta, jumlah tersebut adalah jumlah yang tercatat di dalam rumah penampungan di Kalideres belum lagi dengan yang hidup terlantar di sepanjang jalan Kalideres, Jakarta Barat.. Hal tersebut akan menjadi sulit apabila suatu negara belum meratifikasi seperti Indonesia, yang dimana berarti negara tersebut tidak memiliki kewajiban akan pemenuhan hak dan kewajiban akan pengungsi Internasional tersebut. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut tetapi Indonesia mempunyai kewajiban akan pengungsi tersebut berdasarkan pada asas kemanusiaan maupun ketentuan hukum pengungsi yang sudah jadi hukum kebiasaan.

Kondisi pengungsi di Indonesia pada saat ini sangat memperhatikan dikarenakan para pengungsi tersebut mengalami kekurangan dalam bantuan dana, dan tempat tinggal. Keterbatasan dana yang dimiliki UNHCR sendiri dalam menangani warga negara asing yang menjadi pengungsi maupun pencari suaka yang

⁷*Ibid*

ada di Indonesia menjadikan hal utama yang dialami UNHCR sendiri. Banyaknya jumlah pengungsi yang ada di Jakarta tersebut juga menyebabkan banyak pengungsi yang terpaksa untuk bertempat tinggal di trotoar sepanjang jalan kalideres dengan menggunakan tenda. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena RUDEIM yang telah disediakan oleh pemerintah sudah penuh dan banyak pengungsi yang memaksa untuk tinggal di sepanjang trotoar jalan tersebut karena mereka tidak mau tinggal jauh dari gedung UNHCR dengan harapan segera mendapatkan jawaban atas harapan mereka selama ini yaitu ditempatkan di negara ke-3. Kurang terpenuhinya hak-hak dan perlindungan pengungsi di Kalideres yang hidup terlantar, tidak mendapat hidup yang layak hingga protes dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu akan kehadiran pengungsi. Masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan kehadiran pengungsi di sepanjang jalan trotoar tersebut melayangkan kritik terhadap pihak pemerintah yang berwajib akan hal tersebut, tetapi pemerintah menjawab hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari UNHCR sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai siapakah pihak yang berwenang untuk menangani masalah pengungsi ini.

Indonesia tidak dapat menolak kehadiran pengungsi karena ada ketentuan hukum internasional yaitu yang sudah menjadi prinsip yaitu *non refoulment* yang dimana prinsip tersebut mengatur mengenai larangan penolakan atau pemulangan kembali secara paksa pengungsi ke negara asal yang datang ke suatu wilayah negara dan ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 maka dari itu Indonesia

sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tidak dapat menolak atau bahkan memulangkan pengungsi ke negara asal secara paksa, melainkan pemerintah Indonesia hendaknya memberikan fasilitas dan pelayanan yang layak terhadap pengungsi selama tidak melanggar ketentuan umum. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penganganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dimana di dalam Perpres Nomor 125 tersebut mencangkup mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Persoalan pengungsi berhubungan erat dengan isu hak asasi manusia (HAM) . Hal ini karena pengungsi adalah kelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi, baik di negara asalanya maupun di negara tempat mereka mengungsi. Kendala yang sering dihadapi oleh para pengungsi adalah banyaknya negara yang belum menjadi peserta dari instrumen-instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap para pengungsi. Oleh karena itu, tidak jarang kehadiran pengungsi di negara persinggahan (transit) atau negara tujuan mengalami pelanggaran HAM seperti dipulangkan secara paksa dan tidak mendapatkan perhatian dari negara transit.

Pendekatan Indonesia dalam penanganan pengungsi adalah didasarkan pada kemanusiaan tanpa melihat darimana pengungsi tersebut berasal. Di karenakan Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Indonesia sendiri telah memberikan kontribusi di luar tanggung

jawabnya dengan menerima hingga menampung para pengungsi internasional tersebut untuk sementara waktu di Rumah Detensi Imigran (RUDENIM) sampai solusi jangka panjang diputuskan UNHCR. Tanggung jawab dari pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti sampai pada RUDENIM saja, tetapi dalam hal ini pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa LSM dalam penggalangan dana untuk para pengungsi dan juga pemberian pendidikan kepada pengungsi yang masih berusia anak-anak.

Oleh karena itu, hal-hal sebagaimana tertuang di atas menjadi suatu latar belakang dan tema yang cukup penting bagi penulis untuk dijadikan sebagai tema penelitian dengan judul “Kebijakan UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Internasional di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi (Studi Kasus Pada Pengungsi Afghanistan di Kaliders, Jakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat dirumuskan rumusan masalah adalah “Kebijakan hukum apa yang ditempuh UNHCR dan Pemerintah Indonesia sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afghanistan di Kalideres, Jakarta ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang di berikan oleh *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) dan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan khususnya di bagian hukum internasional terkait “Kebijakan UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta” serta sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UNHCR

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap UNHCR dalam menangani kasus pengungsi di Indonesia serta

menunjukkan status pengungsi dan mencari negara ketiga sebagai tempat penampungan pengungsi yang dimana merupakan salah satu tugas dari UNHCR sebagai organisasi internasional yang mengurus kasus pengungsi.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara serta melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan, selain itu juga agar semakin meningkatkan kepedulian dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi internasional yang berada di wilayah Indonesia.

c. Bagi Pengungsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pengungsi agar pengungsi mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengungsi di wilayah Indonesia.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Internasional

terutama dalam hukum pengungsi dan lembaga PBB yang mengurus permasalahan pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Kebijakan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta**” bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu :

1. Ave Agave Christina Situmorang (150511558), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Peran UNHCR Dalam Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951.

Hasil penelitiannya adalah peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia sebagai negara bukan peserta Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi khususnya pada Rudenim Pekanbaru sebagian besar telah dipenuhi. UNHCR bekerjasama dengan IOM telah memberikan perlindungan kepada para pengungsi dengan memenuhi kebutuhan para pengungsi seperti kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Selain itu, UNHCR juga telah memberikan perlindungan

kepada pengungsi yang ada dengan menjamin diperlakukan yang sama dan sesuai standart dari ketentuan hukum internasional yang diakui, menjamin adanya prinsip *non-refoulement* serta mencari solusi jangka panjang untuk menghadapi masalah pengungsi. UNHCR juga telah melakukan dukungan penyertaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pengungsi internasional.

Dalam melaksanakan peran, UNHCR juga mendapatkan hambatan dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi, diantaranya tidak adanya jaminan bahwa aparat yang bertugas menjaga dan membantu para pengungsi di tempat penampungan (Rudenim) secara terus menerus, adanya kurang koordinasi dari informan yang ada dilapangan dengan pihak pemerintah sehingga data yang di peroleh kurang valid, serta adanya respon warga local yang kurang baik terhadap para pengungsi yang ada di Indonesia khususnya di Rudenim Pekanbaru. Namun, adanya hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dalam menangani kasus pengungsi yang ada di Indonesia tidak menjadi penghalang bagi UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi. UNHCR telah menempuh beberapa upaya dalam mengatasi masalah pengungsi yang ada serta mempromosikan agar Indonesia melakukan penerapan hukum pengungsi internasional di Indonesia.

2. Ni Made Maha Putri Paramitha (120510952), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan

Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah peranan UNHCR terhadap perlindungan Rohingya di Aceh, Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah Peran UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, antara lain : Adanya peran UNHCR dala bidang screening in dan screening out, dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupaka pengungsi atau tidak, hal ini terbukti denan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan screening in dan screening out terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Adanya peran UNHCR yang turun langsung ke lapangan dalam pengadaan sosialisasi pada saat pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan dalam hal penerimaan para pengungsi terebut. Adanya peran UNHCR dalam kewajibannya secara berkala untuk memberi informasi mengenai data statistic pengungsi bulanan sebagai wujud transparasi UNHCR di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya data statistic jumlah pengungsi yang diterima oleh Kementrian Luar Negeri yang di input oleh UNHCR.

3.Yupita Jevanska Atuna (140511740), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Perlindungan Pengungsi Di DIY Berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan pengungsi asing di

DIY berdasarkan perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanggungan pengungsi dari luar negeri.

Hasil penelitiannya adalah Perlindungan pengungsi dari luar negeri di DIY belum dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Pemerintah DIY telah melaksanakan perlindungan pengungsi berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 meskipun belum secara optimal. Oleh karena itu, masih terdapat banyak kekurangan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang perlu dibenahi untuk dapat menjawab dan menjadi solusi bagi Pemerintah Daerah untuk menangani pengungsi. Dengan demikian bahwa peraturan yang baik hanya dapat berlaku efektif jika didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang baik pula. Ketidak mampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan pengungsi asing menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk kembali memperbaiki segala bentuk upaya kerjasama yang mendukung terlaksanannya perlindungan pengungsi berdasarkan kemanusiaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian di atas, skripsi yang akan penulis teliti menekankan pada permasalahan kebijakan UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi Afganistan di kalideres Jakarta. Dalam hal ini tidak ditemukan adanya kesamaan antara hasil penulisan skripsi

yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan penulisan skripsi yang sudah ada baik dalam hal rumusan masalah hingga pada kesimpulan. Skripsi yang akan saya tulis adalah mengenai kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta mengingat Indonesia bukan sebagai negara peserta Konvensi, dan hambatan apa saja yang di alami oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi di Indonesia hingga apakah kebijakan yang dibuat oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia telah memberikan dampak yang baik bagi pengungsi asal Afganistan tersebut dan telah memenuhi hak-hak pengungsi, sedangkan yang dibahas oleh penulis lain dalam keaslian penelitian yang saya tulis dalam keaslian penelitian ini adalah peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia sebagai negara bukan peserta Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi khususnya pada Rudenim Pekanbaru, peran UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, dan Perlindungan pengungsi dari luar negeri di DIY belum dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

F. Batasan Konsep :

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut :

1. Pengungsi.

Pengungsi merupakan orang-orang yang berada diluar negara dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka.⁸

2. Pengungsi Perang

Mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi ini mendapat perlindungan menurut instrument internasional yang lain, yakni Konvensi-Konvensi Geneva 1949.

3. Pengungsi Konvensi.

Pengungsi Mandat dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967 berdasar ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrument-instrumen tersebut. Pengungsi Konvensi ini juga telah

⁸ Konvensi Jenewa 1951 Pasal 1 ayat 1

termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrument-instrumen sebelum tahun 1951.⁹

3. Internally Displaced Person

Orang-orang dalam jumlah besar telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat pertikaian bersenjata, perselisihan internal, kekerasan- kekerasan sistemik terhadap hak-hak azasi manusia atau bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan berada dalam wilayah kekuasaan negara mereka¹⁰

4. Pencari Suaka.

orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.¹¹

5. Prinsip Non-refoulment

Larangan atau tidak diperbolehkan suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (*refugee*) ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi

⁹ Achmad Romsan, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 32

¹⁰ <https://idtesis.com/pengertian-pengungsi-internal-atau-internally-displaced-persons-idps/> diakses pada Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 12:35

¹¹ <https://irs.or.id/refugee/> diakses pada 31 Maret 2020 pukul 11:19 WIB

persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.¹²

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum. Melalui penelitian ini diharapkan perihal mengenai apa yang menjadi alasan UNHCR serta Pemerintah Indonesia mengalami kendala dalam menangani kasus pengungsi di Indonesia dapat digambarkan secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh berupa data yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, diantaranya adalah :

¹² Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
- b) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- c) *Universal Declaration of Human Rights 1948.*
- d) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugee*)
- e) Protokol New York tahun 1967 (*Protokol Relating Status of Refugees 1967*)
- f) Statuta Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, serta pendapat para narasumber yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan:

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan segala referensi, membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan nara sumber untuk menggali informasi mengenai topik terkait. Narasumber primer dalam hal ini ialah Kementerian Luar Negeri, Pejabat di Kantor UNCHR di Indonesia, Staf di Dinas Sosial Jakarta Barat.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah pihak yang berasal dari :

- a. Perwakilan Kantor UNHCR di Indonesia *Associate External Relationship/PI Officer*, Mitra Salima Suryono
- b. Staf Dit. HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Axelsyah Reza Miraza

5. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian dari skripsi ini meliputi:

a. UNHCR Jakarta.

Alamat : Jalan Kebon Sirih Kav.75, 10340 Jakarta Pusat, Indonesia, Menara Ravindo, 14th Floor. Telepon: +62 21 2964 3602.

b. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.

Alamar : Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia.

6. Metode Analisis Data.

Dalam analisis data ini metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang tidak dapat dikuantitatifkan. Metode kuantitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan dari data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam bentuk tulisan.

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini terisi 3 sub bab yang terdiri dari : Tinjauan Umum tentang Perlindungan Pengungsi yang kedua tentang Tinjauan Umum Tentang Kewajiban UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Pengungsi yang ketiga tentang Kewajiban UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Afganistan di Kalideres

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kewajiban UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres serta berisi sara yang diberikan oleh penulis.

